SASDAYA
Gadjah Mada Journal of Humanities

EISSN 2549-3884
Email: sasdayajournal.fib@ugm.ac.id

Praktik Peliyanan dan Pendisiplinan Tubuh Lewat Bahasa Kekerasan di Percakapan Twitter

Helmi Naufal Zul'azmi
Program Studi Kajian Budaya dan Media, Sekolah Pascasarjana, UGM Yogyakarta
Koresponden: helminaufalzulazmi@mail.ugm.ac.id

ABSTRACT

This article aimed to identify how violent languages are operated for othering and disciplining the body as an exercise of power over the LGBTIQ *groups in Indonesia. The analyzed violent language was taken from a conversation on Twitter that responds to Deddy Corbuzier's podcast video with the title* "TUTORIAL JADI G4Y DI INDO!!= PINDAH KE JERMAN (tonton sblm ngamuk) RAGIL AND FRED"*. The issues of violence in language have been arising when the words used by Twitter accounts @cholilnafis, @anasabuabdillah, @mas_po_sanusi, @ridwan2474, @djoesa, @defrizonz, and @samsularifin000 are seen in a particular way in the context of their response to Deddy's podcast video. This article shows that there is a process of othering and disciplining the body through the choices of words that contain elements of violence. Violent languages are operated to alienate others, as in the concept of "blaming others". From Lozano and Laurent's perspective, "blaming others" is accusing minorities under social inappropriateness instead of seeing their own fault. Meanwhile, the process of disciplining the body moves through violent languages that are associated with interpretation of Islamic discourse.*

Keyword: *Violence Language, Othering, Body Discipline, LGBTIQ*

PENDAHULUAN

Tulisan ini berusaha mengidentifikasi bahasa-bahasa kekerasan yang dioperasikan untuk meliyankan kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender, intersex, *queer* (LGBTIQ[1]). Bahasa-bahasa kekerasan itu muncul pada pemilihan kata seperti amputasi, rajam, sampai tumpas. Kata-kata tersebut dekat dengan gagasan dasar untuk menghilangkan bagian tubuh atau nyawa seseorang. Boleh jadi bahasa kekerasan yang sengaja dipilih ialah cara seseorang atau kelompok untuk mengekspresikan bagaimana mereka sungguh memercayai sesuatu dan, barangkali, menganggap diri sendiri sebagai yang maha benar sehingga merasa sah menggunakan bahasa kekerasan ialah selemah-lemahnya akal. Dari situ, bolehlah ekspresi kekerasan dalam bahasa yang sengaja dipilih itu dijadikan serupa jembatan untuk menghubungkan diskursus LGBTIQ, Islam, homofobia, dan pendisiplinan tubuh.

[1] Tulisan ini akan menggunakan dua istilah LGBT dan LGBTIQ. Dua istilah itu merujuk pada subjek yang sama, digunakan secara bolak-balik di tubuh tulisan menyesuaikan konteks yang diterangkan dalam kalimat.

Kekerasan bahasa muncul untuk merespon video podcast Deddy Corbuzier berjudul, "TUTORIAL JADI G4Y DI INDO!!= PINDAH KE JERMAN (tonton sblm ngamuk) RAGIL AND FRED -Podcast". Respon dengan kekerasan bahasa itu ramai di media sosial twitter awal bulan Mei 2022. Deddy Corbuzier mengundang pasangan gay Ragil Mahardika dan Fred di acara Close The Door Corbuzier Podcast miliknya. Video podcast lantas dikecam oleh banyak warganet di twitter. Kecaman warganet diikuti oleh tanda #UnsubscribePodcastCorbuzier. Menukil laporan Tirto.id, setidaknya sampai pagi hari tanggal 11 Mei 2022 ada dua puluh empat ribu tweet yang menggunakan tagar tersebut (tirto.id, 11/5/2022)[2].

Tweet kecaman oleh warganet bisa menjadi tanda untuk menjelaskan kerangka berpikir yang memposisikan diri sebagai "kita" dan "mereka". Kerangka berpikir demikian bermasalah karena meletakkan subjek atau kelompok dalam dikotomi amat sederhana hitam-putih. Subjek "mereka' didudukkan sebagai kategori liyan yang seolah-olah pantas untuk dipinggirkan. Sehingga, praktik-praktik kekerasan dalam bahasa seringkali menciptakan persoalan peliyanan. Kerangka berpikir seperti itu pula yang biasa digunakan untuk menjelaskan hierarki sosial, mendiskriminasi subjek atau kelompok dengan identitas tertentu, sekaligus menciptakan potensi ketegangan dan kekerasan sosial (Udasmoro, 2021)[3].

Dalam konteks tulisan ini, kekerasan bahasa oleh warganet digunakan untuk mendefinisikan siapa yang normal dan abnormal. Abnormal dilekatkan secara semena-mena ke kelompok LGBTIQ. Mereka, melalui cuitan-cuitannya, menunjuk kelompok dengan orientasi seksual berbeda sebagai seseorang yang mengidap penyakit, kelainan jiwa, sehingga pantas ditolong-sembuhkan melalui cara-cara medis atau spiritual. Menunjuk dengan definisi demikian itu juga berarti pula, meski secara tidak langsung, bahwa mereka lah -warganet yang menggunakan bahasa kekerasan itu- yang normal sekaligus benar. Pendefinisian normal dan abnormal ini merupakan salah satu *exercise of power*. Muncul akun-akun twitter yang merespon dengan kosakata dan kalimat represif. Mereka, yang menggunakan kosakata dan kalimat represif itu, memposisikan diri sebagai penyelamat apa yang mereka sebut budaya Indonesia.

Budaya Indonesia dalam kalimat-kalimat represif itu diasumsikan melekat begitu saja pada pengamalan nilai-nilai pancasila, khususnya di sila pertama. Nilai ketuhanan yang dikandung dalam sila pertama berasosiasi pada penafsiran mereka terhadap

---

[2] Tirto.id. (2022). *Tanggapan Ragil Mahardika Usai Podcast Deddy Corbuzier Dihapus.* Diakses pada Juni 2022, dari https://tirto.id/tanggapan-ragil-mahardika-usai-podcast-deddy-corbuzier-dihapus-grWf

[3] Udasmoro, Wening. (2021). Bahasa Kekerasan dan Pilar-Pilar Kekuasaan Baru Masa Pandemi Covid-19. Dalam Udasmoro, Wening., & Rahmawati, Arifah (Ed). *Kekerasan di Masa Pandemi* (hlm. 26-49). Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.

agama. Tafsiran itu beredar di antara cerita tentang nabi Luth, penciptaan manusia laki-laki dan perempuan, sampai pada kisah-kisah tentang kiamat. Penafsiran agama dan sila pertama lebih sering muncul -untuk tidak mengatakan semuanya- daripada sila ketiga, misalnya. Kekerasan bahasa terus-menerus muncul melalui akun-akun di twitter untuk menjustifikasi keutuhan negara berdasarkan ketuhanan. Dalam konteks itu berkelindan relasi kekuasaan antara Islam dan orientasi seksual heteronormatif. Relasi kuasa itu bisa terhubung disebabkan oleh kondisi sosial yang sedang berlaku. Konsep kekuasaan ini kemudian menjadi salah satu lajur untuk menghubungkan wacana dengan masyarakat (Eriyanto, 2009)[4].

Kekuasaan yang dihubung-hubungkan dengan wacana penting untuk kemudian melihat aspek kontrol. Kontrol yang dimaksud tak melulu dalam bentuk fisik atau kontrol langsung. Bagi Eriyanto (2009) kontrol mental dan psikis diperhatikan pula dalam konsep ini. Bahasa-bahasa sakit untuk menunjuk kelompok LGBTIQ dioperasikan agar kemudian bisa diikuti oleh istilah penyembuhan. Kelompok heteronormatif menggunakan wacana agama dan medis untuk mendisiplinkan orientasi seksual kelompok LGBTIQ. Wacana medis yang dirujuk bisa saja sudah usang, atau perlu direkonstruksi lagi. Dede Oetomo (1987)[5] menulis bila homoseksualitas sudah dicabut dari daftar penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa. Upaya tersebut dilakukan melalui Himpunan Psikiatri Amerika pada tahun 1974. Dari situ kelompok heteronormatif berusaha mengontrol psikis dan mental kelompok yang diliyankan. Van Dijk (dalam Wahyono, 2018)[6] mendefinisikan kontrol sebagai kekuasaan sosial kelompok atau institusi. Wacana agama dan bernegara dalam cuitan di twitter menjadi payung dari ekspresi kekerasan bahasa. Kelompok yang menggunakan bahasa represif berupaya mengontrol tafsir teks dan konteks agama. Ekspresi bahasa seperti kiamat, tak bertuhan, kaum nabi Luth menjadi sedikit dari tafsir teks agama untuk mengontrol kelompok LGBTIQ. Tafsir teks agama yang bertujuan untuk mengontrol itu juga bisa dibaca serupa pengendalian situasi terhadap subjek atau kelompok dalam kategori minoritas (Wahyono, 2018).

Pemilihan kata dalam tweet-tweet tersebut mengandung kebencian, kecaman, serta amarah amat mengerikan. Kandungan itu boleh jadi menggambarkan sejauh mana homofobia di kognisi mental masyarakat. Dengan amat terang Amar Alfikar[7] menulis

---

[4] Eriyanto. (2009). Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: LKiS.

[5] Oetomo, Dede. (1987). Homoseksualitas di Barat dan di Indonesia. GAYa Nusantara, 1(1 November-Desember), 9-20.

[6] Wahyono, S., Bayu. (2018). Analisis Wacana Kritis Model Teun A. Van Dijk. Dalam Udasmoro, Wening (Ed). Hamparan Wacana: Dari Praktik Ideologi, Media hingga Kritik Poskolonial (hlm. 27-54). Yogyakarta: Penerbit Ombak.

[7] Alfikar, Amar. (2022). *Islamofobia, Homofobia, dan Politik Keterasingan*. Diakses pada Juni 2022, dari https://islami.co/islamofobia-homofobia-dan-politik-keterasingan/

artikel berjudul *Islamofobia, Homofobia, dan Politik Keterasingan* yang menjelaskan bahwa semakin kelompok muslim takut kepada kelompok minoritas LGBTIQ, semakin Barat berhasil mendesak muslim ke pinggiran. Pandangan demikian mengkontestasi anggapan bahwa LGBTIQ ialah agenda Barat. Justru, seturut dengan artikel Alfikar, agenda Barat adalah menjustifikasi peminggiran kelompok muslim yang 'terbelakang' karena ketakutan berlebihannya kepada kelompok minoritas LGBTIQ. Imaji Barat sebagai tempat mirip surga bagi LGBTIQ tak sepenuhnya tepat. Sebab, pandangan demikian sudah banyak dikritik karena superioritas dan supremasi kulit putih patriarkis masih bercokol. Kebencian, marginalisasi, ketakutan terhadap keragaman seksualitas ialah produk Barat dan modernitas yang meminggirkan identitas *queer*.

Sudah banyak publikasi yang mendedah mekanisme eksklusi melalui penggunaan bahasa kekerasan. Salah satunya dituturkan Udasmoro dalam buku *Kekerasan di Masa Pandemi* (2021). Apa yang diperhatikan Udasmoro dalam tulisan itu ialah kekerasan menggunakan bahasa dan praktik maskulinitas yang memiliki relevansi dengan praktik sehari-hari. Tulisan itu menukik pada detail kecil *exercise of power* pada masa pandemi covid-19. Wening me-problematisasi bahasa di *banner* yang dipasang di jalan masuk kampung dan foto *banner* yang tersebar di grup WhatsApp atau Facebook. *Banner* dan foto *banner* itu dibuat ketika kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan di Indonesia. Ada persoalan peliyanan saat bahasa-bahasa yang digunakan di *banner* dilihat secara partikular dalam konteks pandemi. Sekalipun tak persis sama, tulisan ini meminjam cara berpikir demikian untuk melihat kekerasan bahasa dengan unsur kebencian dan ketakutan berlebihan sehingga memosisikan kelompok LGBTIQ sebagai liyan.

LANDASAN TEORI

Artikel ini menggunakan analisis wacana kritis model Van Dijk untuk melihat praktik kekerasan melalui bahasa yang mengeksklusi kelompok LGBTIQ. Kekerasan bahasa yang digunakan oleh warganet seringkali mengandung gagasan dasar berupa pemutusan hidup. Data-data yang dianalisis diambil dari *reply* di tweet akun @cholilnafis. Akun itu dipilih didasarkan pada hasil *social network analysis* (SNA) yang dilakukan akun @ismailfahmi, pemilik Drone Emprit[8]. Peta *social network analysis* yang dipublikasi @ismailfahmi menunjukkan bila akun @cholilnafis menjadi *top influencer* dalam konteks perbincangan LGBTIQ di twitter untuk merespon video

[8] Drone emprit merupakan sebuah system yang berfungsi memonitor serta menganalisa media social dan platform daring berbasis teknologi big data. System ini menggunakan *artificial intelligence* dan *natural learning process*. Drone emprit mempublikasi peta *social network analysis* tentang isu-isu tertentu.

podcast Deddy Corbuzier. Analisis wacana yang digunakan di sini mengadopsi cara Van Dijk (sebagaimana dikutip Udasmoro, 2021) melihat praktik kekerasan bahasa melalui *wordings, alternative wordings, rewordings.* Kata yang dipilih untuk dianalisis disesuaikan dengan konteks pembicaraan LGBTIQ saat merespon video podcast Deddy. Sebab amat mungkin kata yang dianalisis ialah kata dengan makna biasa ketika digunakan di luar konteks tersebut, tapi pada situasi partikular kata-kata yang dipilih itu menciptakan aspek peliyanan dan pendisiplinan

PEMBAHASAN

Praktik Peliyanan Melalui Bahasa Kekerasan

Diskusi pertama ini diawali dengan identifikasi kebencian dalam pemilihan kata yang mengandung unsur kekerasan. Pemilihan kata dengan unsur kekerasan serupa serangan agresif, teror, ancaman, intimidasi untuk memojokkan subjek yang sedang direpresi. Seturut dengan hasil analisis SNA oleh akun @ismailfahmi[9], akun @cholilnafis menjadi *top influencer* perbincangan LGBTIQ sebagai respon video podcast Deddy di twitter. Akun @cholilnafis dimiliki oleh Muhammad Cholil Nafis. Identitasnya beredar di antara penulis, dosen, laki-laki, ulama, dan ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat bidang dakwah dan ukhuwah 2020-2027 di bio twitternya, dan pemimpin tertinggi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Interseksi identitas demikian itu mampu menjelaskan kenapa akun twitternya bisa menjadi *top influencer*, sebab menempatkan dia dalam kelompok mayoritas berpengaruh.

Ia menduduki dua posisi strategis di organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia dan ketua bidang dakwah dan ukhuwah MUI. Wacana keislaman, termasuk penentuan halal-haram, banyak dipengaruhi oleh tiga lembaga tersebut. Dalam konteks Indonesia yang mayoritas warga negaranya beragama Islam, tentu saja identitas tersebut memberi hak istimewa. Selain itu, identitasnya sebagai penulis dan dosen program studi Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, memungkinkan ia untuk mengontrol wacana akademik. Data pertama yang dianalisis diambil dari cuitan akun twitternya pada tanggal 9 Mei 2022. Cuitan @cholilnafis merupakan quote tweet dari tweet @msaid_didu yang bertanya apakah komunitas LGBT sudah masuk dalam kekuasaan. Wordings yang dipilih @cholilnafis untuk merespon cuitan @msaid_didu mengandung unsur kekerasan secara eksplisit. Kalimat kedua diawali dengan bahasa persuasif. Menyapa Deddy Corbuzier sebagai pemilik podcast dengan kata "yg punya podcast", diikuti

[9] Fahmi, Ismail. (2022). *Drone Emprit: Software for media monitoring and analytics. Available at* http://pers.droneemprit.id. Diakses pada 25 Juni 2022, dari https://twitter.com/ismailfahmi/status/1524193573238755328

dengan harapan @cholilnafis agar Deddy paham Islam. Ada persoalan peliyanan dalam pemilihan kata setelahnya "melarang" dan "mengutuk". Kata melarang dan mengutuk dalam kalimat tersebut diberi kata hubung "dan" untuk menunjukkan satuan bahasa "melarang" dan "mengutuk" dalam konteks itu sederajat. Pada titik ini, @cholilnafis berusaha meliyankan Deddy Corbuzier yang dalam konteks tersebut bukan termasuk kelompok LGBTIQ.

Gambar 1. Cuitan @cholilnafis pada 9 Mei 2022
Sumber: https://twitter.com/cholilnafis/status/1523492726280683520?ref_src=twsrc%5Etfw

Wacana Islam mengalas-dasari dua satuan bahasa itu. Barangkali wacana Islam digunakan karena Deddy Corbuzier seorang mualaf. Deddy diposisikan Islam yang belum paham, sehingga bukan bagian dari Cholil Nafis. Secara gramatikal bahasa Indonesia mengenal hukum Diterangkan-Menerangkan (D-M) dalam susunan tata kalimat. Kata yang bersifat menerangkan berfungsi sebagai pelengkap atau penjelas dari kata yang diterangkan. Dalam susunan kalimat "Saya berharap yg punya podcast itu paham klo Islam melarang dan mengutuk LGBT" menempatkan Islam sebagai sesuatu yang diterangkan oleh kalimat-kalimat setelahnya. Larangan dan kutukan dalam wacana Islam diposisikan penting untuk menyikapi Deddy dan kelompok LGBTIQ. *Wordings* melarang dan mengutuk dalam kalimat itu juga dekat dengan makna yang bersifat instruktif, tak boleh tidak, dan nyaris wajib untuk dilaksanakan.

Kalimat terakhir bisa dibaca sebagai *alternative wordings* yang dipilih untuk menegaskan kalimat sebelumnya. Bahasa "harus diamputasi" mengandung

kekerasan bahasa yang berasosiasi dengan satu tindakan bersifat fisikal. Kalimat ini berfungsi sebagai penekanan dari kalimat sebelumnya. Apalagi disertai kata "harus" sebelum kata "diamputasi". Kata dasar amputasi menjadi biasa-biasa saja bila digunakan dalam konteks medis, namun menjadi bahasa kekerasan bila digunakan dalam konteks pembicaraan LGBTIQ. Amputasi mengandaikan penghilangan, pemotongan sebagian dari diri untuk mencegah agar penyakit tidak menyebar. Oleh karenanya secara tidak langsung @cholilnafis memperlakukan LGBTIQ sebagai penyakit yang mesti disembuhkan melalui penghilangan atau pemotongan.

Ada persoalan ketika kata "harus diamputasi" dipilih di kalimat itu. Sebab, sependek pemahaman penulis, LGBTIQ lebih merujuk pada subjek atau kata benda yang bernyawa alih-alih kata sifat. Selain itu, bahasa-bahasa kekerasan yang dipilih berbentuk kata kerja. Mengandaikan satu tindakan baik secara fisik maupun nonfisik untuk dilakukan. Dua kalimat yang dianalisis menempatkan kelompok LGBTIQ sebagai objek. Bila di kalimat kedua dalam teks susunan kalimatnya berbentuk aktif, dalam kalimat ketiga diubah menjadi kalimat pasif. Proses peliyanan terjadi melalui asumsi @cholilnafis yang didasarkan pada pemosisian "diri" dan "yang lain" dengan cara amat berlebihan. Siapa yang diposisikan "yang lain" bisa dilihat dari produksi bahasa yang menempatkannya sebagai objek.

Gambar 2. Akun @anasabuabdillah dan @mas_po_sanusi me-*reply* tweet @cholilnafis
Sumber: https://twitter.com/anasabuabdillah/status/1523576946197614594

Akun @anasabuabdillah dan @mas_po_sanusi me-*reply* tweet @cholilnafis yang ada di gambar 1. Bila @cholilnafis memilih kata "diamputasi" yang mengandung bahasa kekerasan, @anasabuabdillah dan @mas_po_sanusi menggunakan kata

"ditenggelamkan", "dilempar", dan "dirajam". Kata ditenggelamkan, dalam konteks Indonesia, berasosiasi dengan kebijakan penenggelaman kapal asing oleh menteri kelautan dan perikanan tahun 2014-2019, Susi Pudjiastuti. Susi mengambil kebijakan tegas untuk menenggelamkan kapal asing ilegal yang mencuri ikan di laut Indonesia. Pada konteks itu, pemilihan kalimat "ditenggelamkan" oleh @anasabuabdillah jadi bermasalah, meski dalam konteks lain, amat mungkin kata ditenggelamkan menjadi biasa-biasa saja.

Kalimat "LGBT itu harusnya ditenggelamkan," menempatkan subjek LGBT serupa dengan kapal asing ilegal yang mencuri ikan di luar batas teritorial negara. Kelompok LGBTIQ diandaikan setara dengan kapal pencuri. Sehingga, mengikuti logika @anasabuabdillah, harus ditenggelamkan. Watak kekerasan kalimat itu mengasumsikan kelompok LGBTIQ telah menjarah atau mengutil atau menilap apa yang seharusnya bukan haknya. Persoalan peliyanan persis muncul di asumsi itu. Dasar konstitusi negara yang mengaku dirinya demokratis mestinya mengakui hak-hak dasar warga negara untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri. Bila argumen dasar demokrasi itu diikuti, boleh lah disimpulkan bahwa subjek atau kelompok LGBTIQ tak melakukan pencurian, penjarahan, pengutilan, atau penilapan hak dasar warga negara lain.

Akun @mas_po_sanusi kemudian me-*reply* cuitan @anasabuabdillah. *Reply* tersebut seolah ditujukan untuk mengoreksi penenggelaman. @mas_po_sanusi memberi dua bahasa kekerasan melalui kata "dilempar" dan "dirajam". Seakan-akan ditenggelamkan atau satu tindakan kejam saja tak cukup bila ditimpakan ke kelompok LGBTIQ. Kalimat sederhana "dilempar dari gedung tertinggi" mengandaikan penghilangan nyawa manusia melalui siksaan berupa rasa takut. Imbuhan "ter-" yang mendahului kata "tinggi" berguna untuk menyatakan kondisi "paling", sehingga dalam kalimat itu kata gedung diikuti kata yang menerangkan sifat paling tinggi. Sedangkan bahasa "kemudian dirajam" berfungsi untuk menegaskan siksaan yang dilakukan sebelumnya. *Mindset* yang dibangun di bahasa kekerasan itu secara tak langsung mengatakan jika dilempar dari gedung tertinggi saja tak cukup untuk kelompok LGBTIQ. Perlu pula siksaan badan berupa rajam. Pemilihan kata rajam tentu saja tak bebas nilai. Rajam berasosiasi dengan wacana Islam yang merujuk pada hukuman atau siksaan bagi pelanggar hukum agama. Hukuman atau siksaan dilakukan beramai-ramai terhadap pelanggar hukum agama hingga pelanggar menderita. Oleh karenanya kata rajam yang dipilih berfungsi untuk menunjukkan dominasi kelompok Islam terhadap kelompok minoritas LGBTIQ.

Cuitan @ridwan2474 di gambar 3 merupakan *reply* atas tweet @cholilnafis pada 4 Juni 2022. @cholilnafis mengunggah satu *screenshoot* berita dari Republika yang berjudul

MUI: Larang LGBT, Praktik LGBT dapat merusak karakter dan moralitas bangsa. Dalam satu berita itu pendapat Cholil Nafis nyaris memenuhi seluruh laporan, reporter hanya menyisakan satu pendapat dari ketua PBNU, Ahmad Fahrur Rozi, ditulis di paragraf paling akhir pula. Laporan berita itu, tentu saja, tak memberi ruang kelompok LGBTIQ untuk merepresentasikan dirinya sendiri. Satu *screenshoot* berita disertai tweet oleh @cholilnafis, bertuliskan: "menyimpang itu aritnya (artinya), keinginannya dan prilakunya bertentangan dengan norma agama dan masyarakat. Kewajiban kita menormalkan mereka dg rehabikitasi dan jika perlu memberi sanksi, baik sanksi sosial atau sanksi hukum[10]."

Gambar 3. *Reply* akun @ridwan2474
Sumber: https://twitter.com/ridwan2474/status/1532893252818350080

Tweet @cholilnafis itu akan dibahas di bagian lain tulisan ini, paragraf ini akan membahas bahasa kekerasan yang digunakan, lagi-lagi secara eksplisit, oleh @ridwan2474 saat me-*reply* cuitan @cholilnafis. Kata yang mengandung kekerasan dalam kalimat itu ialah "teroris agama sama LGBT sama2 harus *ditumpas*." Kata ditumpas dekat dengan makna musnah atau binasa sampai akar-akarnya. Artinya, kata tumpas yang diubah bentuk menjadi kata kerja pasif mengandaikan dua kelompok tertuduh agar disingkirkan sampai tak ada sisa. Dari situ, bisa dilihat unsur kekerasan dengan gagasan dasar pemusnahan total, tak ada sisa.

Kata "ditumpas" didahului oleh kalimat yang disusun melalui persamaan. Akun @ridwan2474 mempersamakan kelompok LGBTIQ dengan teroris. Dalam wacana global, Islam sering dilabeli secara negatif melalui term teroris. Islam dituduh sebagai biang perilaku kekerasan. Perilaku kekerasan itulah yang disebut oleh media barat sebentuk teror. Dalam konteks Indonesia, wacana Islam teroris berkontestasi dengan wacana Islam moderat. Wacana Islam teroris ditengarai merupakan suatu konstruk sosial yang ada dalam masyarakat Barat. Memang benar ada jaringan Islam yang melakukan aksi teror -banyak juga yang menyebut Islam ekstrimis- seperti bom Bali, bom JW Marriot dan Ritz Carlton, serta bom gereja saat malam natal. Maka, kalimat

[10] Tipo dan singkatan di kalimat ini ditulis sesuai dengan tweet aslinya. Sedangkan kata dalam tanda kurung ditambahkan oleh penulis untuk memperjelas maksud tweet.

itu dengan terang mempersamakan perilaku kekerasan-kekejaman pelaku teror dengan kelompok LGBTIQ yang, sependek pengamatan penulis tidak pernah melakukan aksi pengeboman.

Kalimat setelahnya diikuti dengan "Yang satu teriak takbir dan yang lain teriak takdir." *Wordings* takbir diikuti *alternative wordings* takdir yang dekat dengan wacana agama Islam. Secara bahasa, kata "takbir" bertujuan untuk membuat koherensi dengan kata "takdir" yang dimaksudkan untuk keselarasan bunyi. Dua kata itu juga berasosiasi dengan kontekstualisasi dua kata sebelumnya. Takbir dianggap sering diucapkan teroris saat melakukan aksi teror, sedangkan takdir diasumsikan @ridwan2474 sering mengalas-dasari pilihan orientasi seksual subjek LGBTIQ.

Gambar 4. *Reply* akun @djoesa
Sumber: https://mobile.twitter.com/Djoesa/status/1523548778997088257

Akun @djoesa me-*reply* cuitan @cholilnafis pada tanggal 9 Mei 2022. LGBT didefinisikan oleh @djoesa sebagai musibah. Pendefinisian itu tampak pada penggunaan kata "adalah". Kata "adalah" yang digunakan juga mengesankan sesuatu yang sudah *fix,* stabil, konstan, serta ajek. Ia tak melihat LGBT sebagai identitas yang cair, dinamis, atau satu identitas saja dari identitas lain yang saling berkelindan. Menghayati Islam tak melulu soal bagaimana seseorang harus menjadi laki-laki atau perempuan dalam logika biner. Sebagaimana yang dihayati Rafa, seorang transpria sekaligus muslim yang dituturkan melalui reportase Project Multatuli (Multatuli, 23/7/2021)[11]. Rafa mengamini bahwa tuhan itu baik melalui

[11] Projectmultatuli.org. (2021). *'Aku Menemukan Tuhan Lewat Keragaman Manusia': Perjalanan Iman Seorang Transpria.* Diakses pada 27 Juni 2022, dari https://projectmultatuli.org/perjalanan-iman-transpria-indonesia/

pergulatannya tentang ketubuhan, keragaman, dan limitasi manusia. Rafa memilih untuk mengagungkan tuhan, membawa nama tuhan dan dekat dengan-Nya dengan cara yang ia percayai, yang aman dan nyaman untuk ia lakukan. Pendefinisian saklek sebagai musibah diikuti pula dengan metafora penyakit kanker. Penyakit kanker berasosiasi dengan ketidakteraturan hormon yang mengancam nyawa manusia. Berasosiasi pula sebagai penyakit penyebab kematian tertinggi yang bisa dengan cepat menjalar ke sel-sel tubuh lain. Metafora itu mengandaikan bila LGBTIQ merupakan penyakit menular berbahaya yang mempertaruhkan nyawa. Kemudian @djoesa menggunakan bahasa instruktif untuk menerangkan kata yang mengandung kekerasan pada diksi "disingkirkan". Bahasa instruktif muncul dua kali dalam kata "harus" dan "wajib". Menegaskan bila penyingkiran kelompok LGBTIQ menurutnya berada dalam level gawat.

Kekerasan dalam bahasa muncul juga secara eksplisit di diksi "dibinasakan". Diksi itu digunakan untuk menyusun kalimat yang sifatnya persuasif. Diawali kata jika untuk memberi ilusi seolah-olah menawarkan pembinaan. Ilusi pembinaan segera diikuti serangan "dibinasakan" yang mengandaikan pemusnahan atau pelenyapan. Menghilangkan sesuatu hingga sesuatu itu sebisa mungkin tak meninggalkan jejak. Cuitan itu disusun melalui kalimat paradoksal. Kalimat paradoksal bisa dibaca dari kalimat instruktif harus dan wajib, sejurus kemudian diikuti oleh ilusi tawaran pembinaan. Ilusi tawaran pembinaan yang muncul bisa pula berfungsi untuk membatalkan keharusan dan kewajiban pada kalimat sebelumnya. Bila memaknai semua bahasa itu secara utuh, maka kalimat "disingkirkan dari negeri ini" tak merujuk pada pemindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Diksi "disingkirkan" lebih dekat dengan makna menghilangkan nyawa seseorang.

Kalimat paradoksal disebut Fairclough (1989)[12] sebagai bahasa sarkastik yang merupakan bentuk bahasa ekspresif, serta bermuatan sentimen kebencian. Dalam kalimat-kalimat tersebut, inti dari pesan ada di kalimat terakhir, yakni pembinasaan. Contoh lain bahasa ekspresif dengan sentimen kebencian yang disusun secara paradoksal ada pada cuitan: *Penyakit mesti di sembuhkan, kalau gk mau disembuhkan, lenyapkaaan…* Cuitan itu diambil dari akun @rahmatsblog pada tanggal 4 Juni. akun tersebut me-*reply* tweet @cholilnafis pada tanggal yang sama. Konsep bahasa sarkastik Fairclough memberi tawaran pemahaman bahwa kalimat tersebut bersifat paradoksal untuk menunjukkan kemarahan sekaligus kebencian. Kalimat diawali dengan keharusan disembuhkan melalui pemilihan kata "mesti". Namun, seperti tweet sebelumnya, inti pesan ada di kata terakhir, yakni "lenyapkaaan" dengan penekanan kata "a" yang diketik tiga kali. Kemestian disembuhkan dianulir oleh

[12] Fairclough, Norman. (1989). *Language and Power.* London and New York: Longman.

pembuat kalimat itu sendiri karena makna disembuhkan berbeda -jika tidak bertolak belakang- dengan makna kata lenyap.

Peliyanan dengan cara *blaming others* menjadi benang merah dari empat teks yang dianalisis sebelumnya. *Blaming others* dalam kerangka Lozano dan Laurent (2019)[13] merupakan cara untuk mempertahankan posisi diri agar terlihat baik sekaligus menutupi kenyataan yang ada. Lozano dan Laurent menmbangun argumen *blaming others* untuk melihat bagaimana seseorang cenderung enggan mengakui kesalahan mereka sendiri, justru mengalihkan kesalahan diri sendiri kepada orang lain dalam payung ketidakpantasan secara sosial. Dalam konteks tulisan ini, *blaming others* dilekatkan pada kelompok LGBTIQ dengan cara vonis perilaku kelompok minoritas ini sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan agama Islam dan budaya di Indonesia. Akun-akun yang menggunakan bahasa kekerasan untuk mengeksklusi kelompok minoritas memosisikan diri sebagai pihak otoritatif penjaga agama dan kebudayaan.

Pendisiplinan Tubuh Dan Tafsir Wacana Keislaman

Tiap-tiap akun yang me-*reply* cuitan @cholilnafis dengan kekerasan bahasa bisa dibaca sebagai hasrat individu untuk mengontrol orang lain. Bahasa kekerasan yang dipilih menunjukkan kekuasaan beroperasi dalam setiap relasi sosial, ekonomi, keluarga, dan seksualitas. Kekuasaan tak lagi bergerak berdasarkan otoritas normatif yang mengandaikan kerangka *top-down*. Konsep *disciplinary power* tawaran Foucault akan dipinjam dalam tulisan ini untuk melihat wacana pendisiplinan tubuh melalui kekerasan bahasa pada kelompok LGBTIQ. Foucault (1995)[14] berargumen bahwa bentuk kekuasaan ialah *disciplinary power* yang beroperasi melalui pendisiplinan tubuh. Cara berpikir Foucault dalam konsep ini menempatkan tubuh pada posisi sentral dalam beroperasinya kekuasaan. Pendisiplinan tubuh bertujuan untuk membentuk tubuh-tubuh yang patuh.

Reply di cuitan @cholilnafis banyak yang menginstruksikan agar kelompok LGBTIQ segera disembuhkan. Disembuhkan dalam konteks ini mengarah pada dua cara yaitu medis dan spiritual seperti seperti sudah disebut sebelumnya. Tweet @cholilnafis pada tanggal 4 Juni secara eksplisit memvonis kelompok LGBT sebagai perilaku menyimpang. Tweet itu, seperti yang sudah sedikit dijelaskan sebelumnya, memilih kata "menormalkan" dan "rehabilitasi".

---

[13] Lozano, E. B., & Laurent, S. M. (2019). The Effect of admitting fault versus shifting blame on expectations for others to do the same. *PLOS ONE, 14*(3), e0213276. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0213276

[14] Foucault, Michel. (1995). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* (second). New York: Vintage Books.

@cholilnafis membuat perbedaan di kalimat pertama dengan cara menyebut *self* sebagai sesuatu yang dianggap normal dan *others* ialah sebaliknya. Kekerasan dalam bahasa tampak implisit dalam kalimat ini, bisa dilihat di pemilihan kata "menyimpang" alih-alih perbedaan dalam konteks orientasi seksual di Indonesia. Menyimpang dalam kosakata yang dipilih itu serupa tuduhan atau vonis yang segera diikuti oleh bahasa "bertentangan dengan norma agama dan masyarakat." Persis pada tuduhan dan vonis itulah kata "menyimpang" memuat kekerasan dalam bahasa.

Tuduhan atau vonis dilanjutkan dengan memilih kosakata menormalkan dan rehabilitasi. Kata menormalkan dengan terang berasosiasi sebagai satu tindakan, sebab kosakata itu diubah dalam bentuk kata kerja. Kosakata menormalkan dalam konsep *disciplinary power* ialah praktik normalisasi. Proses berlangsungnya kekuasaan terhadap tubuh individu (Foucault, 1995). Kata itu menunjukkan proses mekanisme beroperasinya kekuasaan melalui bahasa. Dengan menunjuk kelompok LGBTIQ sebagai penyimpangan, kosakata menormalkan yang dipilih @cholilnafis mendudukkan akun itu sebagai subjek yang sedang mengoperasikan kekuasaannya terhadap tubuh-tubuh kelompok LGBTIQ. Operasi kekuasaan itu bergerak melalui relasi seksualitas yang menganggap LGBTIQ sebentuk penyimpangan.

Foucault mengembangkan konsep *disciplinary power* dengan argumentasi bahwa kekuasaan yang demikian akan lebih efektif jika beroperasi dalam ranah institusi. Institusi dalam kerangka berpikir Foucault dapat merujuk pada negara, sekolah, penjara, rumah sakit, pusat rehabilitasi, sampai institusi agama. Tweet @cholilnafis dilanjutkan dengan anjuran cara menormalkan kelompok LGBT melalui rehabilitasi. Pemilihan kata rehabilitasi merujuk tempat atau ruang atau bangunan yang diperuntukkan bagi orang yang hendak memulihkan keadaan. Sehingga, diksi "rehabilitasi" yang dipilih diandaikan agar pendisiplinan tubuh-tubuh LGBT bisa dilakukan lebih efektif melalui pusat-pusat rehabilitasi. Konsep ini dilanjutkan Foucault dengan cara meletakkan tubuh dalam ranah yang politis. Mengargumentasikan bahwa relasi kuasa berusaha membuat tubuh patuh agar produktif dan reproduktif dalam kerangka politik-ekonomi.

Lanjutan konsep *disciplinary power* itu meski tidak persis sama dengan kasus yang dianalisis di tulisan ini, tetap saja membantu untuk melihat semacam motivasi akun-akun twitter yang berusaha menundukkan tubuh-tubuh kelompok LGBTIQ. Meski amat terburu-buru dan simplikatif, boleh jadi bahasa kekerasan yang digunakan untuk mendisiplinkan tubuh ialah cara akun-akun tersebut sebagai tubuh sosial yang memikul rasa sakit dari praktik kehidupan sehari-hari yang mereka lalui. Sekaligus untuk melanjutkan tatanan 'normal' yang mungkin menguntungkan bagi mereka.

cholil nafis
@cholilnafis

Menyimpang itu aritnya, keinginannya dan prilakunnya bertentangan dengan norma agama dan masyarakat. Kewajiban kita menormalkan mereka dg rehabikitasi dan jika perlu memberi sanksi, baik sanksi sosial atau sanksi hukum.

Translate Tweet

MUI: Larang LGBT

Praktik LGBT dapat merusak karakter dan moralitas bangsa.

■ MUHYIDDIN

JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyeru pemerintah untuk melarang segala praktik LGBT (lesbian, *gay*, biseksual, dan transgender) di Indonesia. MUI juga mendorong agar pemerintah dan DPR memasukkan perilaku homoseksual secara umum sebagai perbuatan pidana dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Dari sisi hukum Islam, orang yang menjalankan praktik LGBT jelas akan dihukum berat," ujar Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis kepada *Republika*, Jumat (3/6).

Kemudian, dia melanjutkan, dalam beberapa penelitian, perilaku LGBT juga dapat menyebabkan penyakit. Ia mencontohkan, penyakit HIV dan cacar monyet yang diduga kuat disebabkan oleh hubungan sejenis dan menimpa banyak laki-laki yang melakukan liwat.

Meskipun tidak merugikan orang per orang atau individu secara langsung, menurut Kiai Cholil, LGBT juga dapat merusak karakter dan moralitas bangsa. Selain itu, Indonesia hanya mengakui dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan.

"Tiga alasan inilah yang perlu diakomodasi pemerintah. Karena itu, ini (LGBT) perlu dilarang, dimasukkan ke dalam KUHP," ujar Kiai Cholil.

Ia menekankan, ancaman pidana terhadap LGBT berlaku tak hanya karena pencabulan, pemaksaan, atau kampanye pornografi. Namun, juga dalam keadaan suka sama suka berlaku hukum pidana serupa.

Sebelumnya, MUI bersama pimpinan ormas-ormas Islam tingkat pusat sepakat menolak LGBT. Mereka bahkan mengeluarkan 15 pernyataan sikap yang disepakati dalam Halaqah Dakwah Lintas Ormas bertajuk "Mengapa Kita Menolak LGBT" yang diinisiasi Komisi Dakwah MUI di Jakarta, Selasa (31/5).

Melalui pernyataan sikap tersebut, MUI dan ormas-ormas Islam mendesak pemerintah segera mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang melarang perilaku dan praktik LGBT untuk menekan pergerakannya secara masif.

Dia menjelaskan, pelarangan dan penolakan terhadap perilaku LGBT karena bertentangan paham dengan agama, khususnya agama Islam yang mengajarkan bahwa penciptaan manusia hakikatnya berpasang-pasangan dan adanya kecenderungan orientasi seksual kepada lawan jenis (pasangannya).

"Dengan langkah ini, kami menyampaikannya pada Panja Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian di DPR nanti juga akan disampaikan kepada pemerintah," kata Kiai Cholil.

Selain itu, apabila ditinjau dari dasar negara dan peraturan perundang-undangan, perkawinan sesama jenis sebagaimana diinginkan komunitas LGBT merupakan pelanggaran terhadap dasar negara Pancasila, UUD 1945, dan UU.

Terkait hal ini, MUI juga telah menerbitkan Fatwa Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, *Gay*, Sodomi, dan Pencabulan. Dalam fatwa ini dinyatakan bahwa homoseksual, baik lesbian maupun *gay* hukumnya haram dan merupakan bentuk kejahatan (jarimah).

"Tak hanya menolak, kami juga bekerja sama dengan beberapa pihak untuk melakukan rehabilitasi terhadap orang yang terjangkit LGBT. Kami ingin melibatkan para ulama, psikolog, dan berbagai rumah sakit untuk membantu mereka yang memiliki orientasi salah dan perlu diluruskan," ujar Kiai Cholil.

Ketua Komisi Dakwah MUI KH Ahmad Zubaidi mengatakan, dalam butir pernyataan sikap tersebut peserta halaqah menyepakati bahwa LGBT sangat dilarang oleh agama Islam (QS al-A'raf: 80-84).

"Peserta halaqah juga mendorong agar pemerintah dan DPR memasukkan perilaku homoseksual secara umum sebagai perbuatan pidana dalam Rancangan Undang-undang Hukum Pidana," kata dia.

Sementara, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Ahmad Fahrur Rozi, mendukung sikap MUI dan mendorong adanya RUU yang melarang LGBT. "Pelakunya diberikan tindakan pencegahan dan hukum. Bisa juga terapi penyembuhan, baru hukuman sebagaimana pelaku narkoba," ujar Gus Fahrur. ■ ed: wachidah handasah

6:55 AM · Jun 4, 2022 · Twitter for iPhone

Gambar 5. Tweet @cholilnafis pada tanggal 4 Juni
Sumber: https://twitter.com/cholilnafis/status/1532873716547219457

Tweet @cholilnafis yang dijelaskan sebelum ini di-*reply* salah satunya oleh akun @defrizonz. Akun itu menggunakan wacana Islam untuk mendisiplinkan kelompok LGBTIQ. @defrizonz menilai bahwa homoseksual merupakan penyimpangan yang disebabkan kedangkalan nilai-nilai agama. Setelahnya ia menggunakan kalimat "sangat merusak" untuk menandai kelompok LGBTIQ merupakan sesuatu yang

menyebabkan perusakan. Kalimat itu mengandung kekerasan dalam kata "dihapuskan" yang berasosiasi dengan penghilangan perilaku. Penghilangan perilaku juga berarti mengembalikan pada perilaku seksual yang dinilai normal.

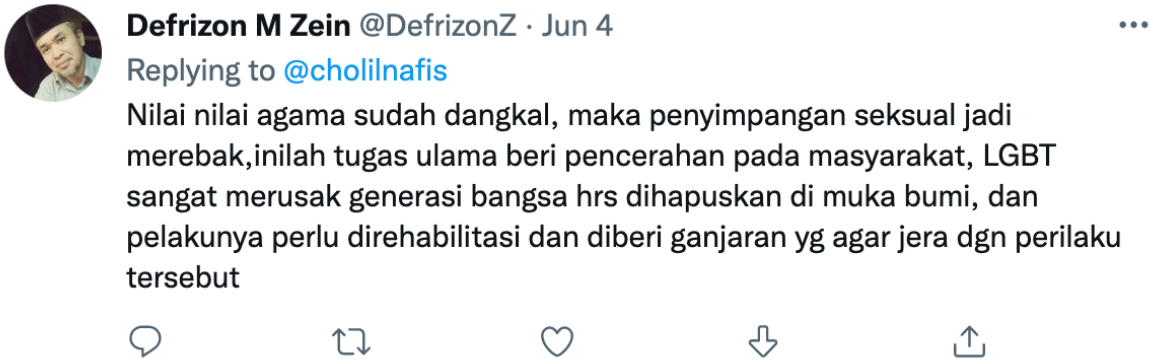

Gambar 6. *Reply* tweet akun @defrizonz
Sumber: https://twitter.com/DefrizonZ/status/1533046141696475136

Kata "direhabilitasi" dan "ganjaran" merupakan bentuk hukuman dalam kalimat tersebut. Hukuman ini diberikan untuk mengembalikan ke perilaku seksual 'normal'. Tepat di situ mekanisme penundukan tubuh melalui bahasa dilakukan oleh @defrizonz. Rehabilitasi dan ganjaran menjadi hukuman karena perilaku mereka yang dinilai abnormal. Dengan hukuman dan ganjaran kelompok minoritas dibayangkan bisa mengubah perilakunya ke apa yang dianggap normal. Itulah praktik normalisasi yang dimaksud Foucault. Melihat mekanisme pendisiplinan tubuh melalui normalisasi.

Tafsir cerita kaum Luth yang dipilih akun @samsularifin000 menunjukkan kebencian yang berlebihan. Menggunakan bahasa yang membuat kontras antara pelaku kejahatan dan homoseksualitas. Homoseksualitas ada pada level sangat berbahaya melampaui kejahatan yang lain. @samsularifin000 menggunakan tafsir HR. Muhammad untuk menunjukkan hukuman bagi kelompok LGBTIQ. Tafsir yang dipilih itu sekaligus mengandung kekerasan dalam bahasa.

Bahasa yang dipilih menggunakan diksi "bunuh" untuk menghukum homoseksualitas. Persoalan yang dikandung dalam pemilihan kata "bunuh" karena mengasumsikan gagasan dasar penghilangan nyawa manusia! Apabila membunuh juga termasuk perilaku kejahatan, dalam logika bahasa tersebut mengandaikan bahwa kelompok LGBTIQ lebih buruk daripada seseorang yang membunuh. Sehingga menyusun logika bahwa @samsularifin000 berposisi lebih baik sekalipun ia membunuh subjek dengan orientasi seksual non-hetero. Pemilihan diksi "bunuh" dalam bahasa tersebut berguna untuk mendisiplinkan tubuh LGBTIQ dengan

ketakutan. Apalagi disertai tanda seru (!) yang menjelaskan bahwa bahasa itu serupa seruan atau perintah.

Gambar 7. *Reply* akun @samsularifin000
Sumber: https://twitter.com/SamsulArifin000/status/1523559154711134208

Sudah banyak tafsir alternatif atas kisah nabi Luth untuk mendudukkan Islam agar lebih damai dan inklusif. Salah satunya ditulis dalam buku berjudul *Tafsir Progresif Islam dan Kristen Terhadap Keragaman Gender dan Seksualitas,* disusun oleh GAYa Nusantara (2020)[15]. Buku ini menawarkan tafsir alternatif kisah nabi Luth melalui pembacaan ulang surah Al-A'rof dan An-Nisaa' secara saksama. Pembacaan secara saksama itu menyimpulkan bahwa dalam relasi seksual peringatan dan hukuman yang diterima oleh kaum nabi Luth ditujukan untuk menentang praktik pemerkosaan dan eksploitasi seksual. Tafsir demikian tidak menafikan perilaku nabi Luth yang disebut biseksual. Argumen utama tafsir itu juga menjelaskan hukuman yang diberikan kepada waria. Dengan merujuk sumber klasik Islam yang diandaikan lebih terbebas dari pengaruh kolonialisme, buku tersebut menganggap bahwa para ulama mengakui adanya waria dan membaginya menjadi dua, yaitu: waria yang kodrati dan waria yang dibuat-buat. Untuk waria kodrati mestinya tak boleh dihukum dan

[15] Nusantara, GAYa. (2020). Tafsir Progresif Islam dan Kristen terhadap keragaman gender dan seksualitas: Sebuah panduan memahami tubuh dan Tuhan (cetakan pertama). Indonesia: GAYa Nusantara.

direndahkan. Selain itu, buku tersebut menuliskan temuan sejarah bahwa pada masa nabi Muhammad tak pernah ada penghukuman yang dilakukan kepada gay.

Konteks penyusunan kerangka pemikiran Foucault (1995) tentang *disciplinary power* memang tak sepenuhnya sama dengan konteks bahasan tulisan ini. Foucault mengembangkan teorinya dengan menyebut *governmentality* sebagai perpanjangan kekuasaan. *Governmentality* dalam pemikiran Foucault memiliki persamaan sifat dengan tiga teks di atas. Tiga teks di atas berlaku sebagai populasi atau tubuh sosial yang memberlakukan kelompok LGBTIQ sebagai tubuh yang perlu didisiplinkan. Tubuh sebagai sasaran pendisiplinan bergerak melalui wacana dan tafsir keislaman. Amar Alfikar sempat merespon gaduh penolakan terhadap kelompok LGBTIQ. Ia membuat *thread* singkat di twitter pada tanggal 10 Mei 2022. *Thread* itu menganggap ada persoalan kolonialisme, istilah LGBT, politik identitas (populisme), dan tafsir agama yang menyebabkan ketakutan berlebihan dengan ekspresi bahasa kekerasan pada kelompok LGBTIQ. Amar Alfikar yang mengidentifikasi diri sebagai transpria merujuk buku, penelitian, esai sebagai landasan *thread*-nya. Sebagai anak kyai serta mahasiswa teologi dan agama tentu pilihan bacaan tersebut mencerminkan bagaimana Alfikar menghayati persinggungan Islam dengan keragaman. Ia memilih tafsir agama Islam yang lebih dekat dengan ketentraman, keadilan, kebaikan, welas asih, alih-alih tafsir yang menghakimi atau menindas. *Thread* singkat pada 10 Mei 2022 itu serupa perlawanan kecil terhadap kekerasan bahasa yang menyudutkan kelompok minoritas LGBTIQ.

KESIMPULAN

Saat video podcast Deddy Corbuzier dengan narasumber Ragil dan Fred viral, muncul banyak respon di *reply* akun Twitter @cholilnafis yang mengoperasikan bahasa kekerasan. Praktik kekerasan dalam bahasa yang dipilih mengandung unsur kebencian, kecaman, amarah, serta kekejian yang berusaha meliyankan kelompok minoritas LGBTIQ. Bahasa kekerasan itu muncul dalam kata-kata diamputasi, ditenggelamkan, dilempar, dirajam, ditumpas, disingkirkan, dibinasakan, dihapuskan, sampai bunuh. Banyak dari pemilihan kata itu ada dalam bentuk kata kerja pasif. Kelompok LGBTIQ ditempatkan sebagai objek dalam susunan kalimat yang mengandung kekerasan bahasa. Objektifikasi dalam kalimat demikian mendudukkan kelompok LGBTIQ sebagai objek peliyanan yang dilekati stigma-stigma negatif.

Bahasa kekerasan yang dipilih bergerak di seputar wacana Islam dan kenegaraan. Menafsirkan Islam dan bagaimana menjadi warga negara Indonesia untuk meminggirkan kelompok LGBTIQ. Lapis identitas lain dari individu LGBTIQ diabaikan dalam percakapan tersebut. Dari situ muncul persoalan peliyanan terhadap

kelompok LGBTIQ. *Blaming others* merupakan benang merah dari bahasa kekerasan untuk meliyankan kelompok LGBTIQ. Menurut Lozano dan Laurent (2019) *blaming others* merupakan cara untuk mempertahankan posisi diri agar terlihat baik sekaligus menutupi kenyataan yang ada. Argumen Lozano dan Laurent tentang *blaming others* mampu menunjukkan bahwa seseorang cenderung tidak mau mengakui kesalahan mereka sendiri. Kesalahan diri sendiri disubtitusi kepada orang lain dalam payung ketidakpantasan secara sosial. *Blaming others* dilekatkan pada kelompok LGBTIQ dengan cara memvonis perilaku kelompok minoritas seksual. Perilaku itu didudukkan sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan agama Islam dan budaya di Indonesia. Akun-akun yang menggunakan bahasa kekerasan untuk mengeksklusi kelompok minoritas memosisikan diri sebagai pihak otoritatif penjaga agama dan kebudayaan.

Wacana keislaman juga dioperasikan untuk mendisiplinkan tubuh-tubuh minoritas LGBTIQ. Cuitan bahasa kekerasan secara implisit menunjukkan keinginan individu untuk mengontrol orang lain. Mendisiplinkan tubuh dengan wacana keislaman bertujuan membentuk orientasi seksual yang patuh, dalam konteks ini ialah heteronormatif. *Disciplinary power* atau praktik normalisasi beroperasi melalui pemilihan kata-kata menormalkan, rehabilitasi, menyimpang, ganjaran, dan sangat merusak. Pemilihan kata-kata itu ditujukan kepada kelompok minoritas LGBTIQ yang didudukkan sebagai objek penyimpangan, sehingga perlu disembuhkan. Dalam kosakata Foucault, disembuhkan itulah yang dimaksud pendisiplinan tubuh. Agar orientasi seksual sesuai dengan kelompok heteronormatif yang melakukan *exercise of power*. Bahasa kekerasan di twitter itu berlaku sebagai populasi atau tubuh sosial yang memberlakukan kelompok LGBTIQ sebagai tubuh yang perlu didisiplinkan. Dalam *thread* singkat di twitter, Amar Alfikar[16] menganggap ada persoalan kolonialisme, istilah LGBT, politik identitas, dan tafsir agama yang menyebabkan ketakutan berlebihan. Hal itu tercermin dalam bahasa kekerasan yang ditujukan kepada kelompok LGBTIQ. *Thread* singkat itu serupa perlawanan kecil terhadap kekerasan bahasa yang berusaha mengeksklusi minoritas seksual LGBTIQ.

BLIBLIOGRAFI

Alfikar, Amar. (2022). *Islamofobia, Homofobia, dan Politik Keterasingan.* Diakses pada 21 Juni 2022, dari https://islami.co/islamofobia-homofobia-dan-politik-keterasingan/

Eriyanto. (2009). *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media.* Yogyakarta: LKiS.

[16] *Thread* singkat Amar Alfikar bisa diakses melalui link https://twitter.com/amaralfikar/status/1523903954605772801?s=20&t=Iwn5ZHlH4T9IZC-WFXFwNQ

Fahmi, Ismail. (2022). *Drone Emprit: Software for media monitoring and analytics*. *Available at http://pers.droneemprit.id*. Diakses pada 25 Juni 2022, dari https://twitter.com/ismailfahmi/status/1524193573238755328

Fairclough, Norman. (1989). *Language and Power.* London & New York: Longman.

Foucault, Michel. (1995). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* (second). New York: Vintage Books.

Lozano, E. B., & Laurent, S. M. (2019). The effect of admitting fault versus shifting blame on expectations for others to do the same. *PLOS ONE, 14*(3), e0213276. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0213276

Nusantara, GAYa. (2020). *Tafsir progresif Islam dan Kristen terhadap keragaman gender dan seksualitas: Sebuah Panduan memahami tubuh dan Tuhan* (cetakan pertama). Indonesia: GAYa Nusantara.

Oetomo, Dede. (1987). Homoseksualitas di Barat dan di Indonesia. *GAYa Nusantara, 1*(1 November-Desember), 9-20.

Project Multatuli.org. (2021). *"Aku Menemukan Tuhan Lewat Keragaman Manusia": Perjalanan Iman Seorang Transpria.* Diakses pada 27 Juni 2022, dari https://projectmultatuli.org/perjalanan-iman-transpria-indonesia/

Tirto.id. (2022). *Tanggapan Ragil Mahardika Usai Podcast Deddy Corbuzier Dihapus.* Diakses pada 22 Juni 2022, dari https://tirto.id/tanggapan-ragil-mahardika-usai-podcast-deddy-corbuzier-dihapus-grWf

Udasmoro, Wening. (2021). Bahasa Kekerasan dan Pilar-Pilar Kekuasaan Baru Masa Pandemi Covid-19. Dalam Udasmoro, W., & Rahmawati, Arifah (Ed). *Kekerasan di Masa Pandemi* (hlm. 26-49). Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.

Wahyono, S., Bayu. (2018). Analisis Wacana Kritis Model Teun A. Van Dijk. Dalam Udasmoro, Wening (Ed). *Hamparan Wacana: Dari Praktik Ideologi, Media hingga Kritik Poskolonial* (hlm. 27-54). Yogyakarta: Penerbit Ombak.